

enam kali penertiban terkait penambangan dan tower. Penertiban menurutnya sudah sesuai dengan tugasnya sampai sebelum kejadian pembantaian. Pembawa acara mengatakan sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan Bupati, namun apakah hanya ditegur, mengapa tidak sampai ke hukum? Bupati berdalih itulah tugasnya, hanya memberikan teguran, karena kewenangan lebih lanjut adalah pada polisi.

”Bapak kan presidennya Lumajang, tinggal suruh Kapolres tangkap saja.” Pembawa acara menyanggah pernyataan tersebut.

Merasa tidak puas dengan pernyataan tersebut Koordinator KontraS, Haris Azhar ikut menyanggah dengan nada tinggi,

“Anda melihat tidak, Satpol PP anda melihat tidak 300 truk mondar mandir? Ada pasal KUHP ketika pejabat Negara yang melihat kejahatan dan dia tidak menghentikan itu maka dia adalah criminal dan bisa dipidana. Anda Bupati! Disumpah anda! Anda tidak bisa mengatakan tugas anda hanya mengajukan dan menghentikan! Baca tu Undang-Undang Otonomi Daerah. Polisi itu koordinasi dengan pimpinan daerah. Yang ditanya bang Karni tentang penambangnya. Pilihannya cuma dua, anda tahu tidak! Saya mohon maaf nggak enak, anda tidak melakukan anda bagian dari kejahatan. Kalau anda tidak tahu, maka anada bukan Bupati yang benar untuk warga anda!”



Gambar 8
Koordinator KontraS menyela pernyataan Bupati Lumajang

Merasa terpojokan Bupati mengatakan hari ini sebenarnya kita hanya melakukan diskusi dimana kita lihat yang sudah diperbuat atau belum. Dia merasa sudah melakukan banyak penertiban sebelum kejadian dan jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan itu karena musibah dan tidak hanya ada di Lumajang.

“ Ini bukan musibah pak! Ini akibat yang logic dari keadaan yang dibiarkan berlarut-larut, dan kepala desa menjadi kepala mafia di desa...” pembawa acara menyanggah kembali.

“Pak Karni saya bukan apa ya, kalau pak Kades salah atau siapapun silahkan diusut dengan peraturan yang ada”. Bupati membela diri.

Dilanjutkan *video call* dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaefullah Yusuf yang sudah mengikuti acara dari awal. Kemudian dia menjelaskan tentang tata cara penambangan secara legal. Pembawa acara menanyakan apakah hanya penambangan legal saja yang dilihat pemerintah, bagaimana dengan illegal? Wagub menjawab Bupati Walikota yang memiliki instrument itu baik legal maupun illegal dan harus bersinergi dengan Polri setempat.



Gambar 9
Video call dengan Wakil Gubernur Jawa Timur pada segmen enam

Setelah itu Oni Mahrdira, Direktur Eksekutif WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jawa Timur mendapat giliran untuk menyampaikan argumentasinya. WALHI menjabarkan tentang beberapa perusahaan yang menambang pasir besi di seluruh Jawa Timur dan untuk kasus Salim Kancil lokasi penambangan masuk lahan Perhutani. Menurut Perencanaan Tata Ruang, Lumajang adalah wilayah rawan bencana namun juga menjadi kawasan tambang. Tentu saja ini menjadi pertanyaan mengapa bisa demikian. Anggota DPR Komisi 3 (Hukum) dari fraksi Nasdem, Akbar Faisal mengutip kata-kata Mahatma Gandhi dan dilanjutkan dengan argumentasinya.

“Bumi ini cukup memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup memenuhi segelintir manusia serakah. Bapak polisi, DPR Bupati jangan fikit anda paling tahu! Kami juga tahu. Barusan ada sms masuk, tolong tanyakan pada polisi alat untuk nyetrum alat siapa? Konon katanya milik polisi.”

Akbar Faisal menceritakan saat para anggota DPR datang langsung ke lokasi penambangan termasuk rumah korban Tosan dan Salim Kancil. Sehingga ada dua simpulan oleh anggota DPR Komisi 3. Pertama adanya pembiaran oleh pemda, apapun alasan dari Bupati, dengan nada tinggi dia mengatakan,

“ kalau anda tidak tahu, berarti anda tidak cakap memimpin daerah anda! Anda tidak cerdas mengelola daerah anda. Mohon maaf Bupati kalau mau mengelola Negara anda harus begini bahasanya.”

Terakhir, anggota DPR mengapresiasi Polda Jatim yang dengan cepat mengambil alih kasus dari daerah. Warga Lumajang sudah melapor sejak tanggal 10 September dan sampai tanggal 26 terjadi pembunuhan, selama 15 hari itu aparat kepolisian daerah melakukan pembiaran.

“Pak Kapolres saya sedih mendengar jawaban anda, ada anggota polisi saya sebutkan namanya Bripka Sigid Pramono ada disitu! Kasatreskrim Aiptu Heri apa sudah diperiksa? Tolong periksa mantan Kapolres disana!”

Tidak sampai disitu saja Akbar Faisal menyebutkan nama wakil direktur bernama Deni dan langsung mengatakan bahwa ketua DPRD Lumajang mengenalnya. Dan terlihat Ketua DPRD Lumajang menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Dia juga mengatakan kekesalannya saat meminta Kapolres lama untuk diperiksa namun di hadang oleh Ketua DPRD Lumajang. Segmen terakhir yaitu segmen 7 dibuka dengan kutipan bekas Walikota New York, Rudy Giuliani.

“Sudah waktunya organisasi penegak hukum dibuat seorganisir mungkin karena mafia dan kejahatan organisasinya sudah sempurna dan dimana- mana”.

Dilanjutkan dengan pernyataan dari Kadiv Humas Polri, Iren Pol Anton Charliyan yang mengatakan sudah menangkap dua perwira dan satu bintara. Polisi juga sudah membentuk beberapa tim untuk mengusut kejadian bukan hanya cari panggung seperti yang dikatakan Kontras tadi. Anggotanya memang terlibat namun bukan hanya anggota polisi saja yang menjadi penikmat tertinggi, ada perhutani yang menerima puluhan juta dari kasus ini. Ditambahkan oleh Komisioner Kopolnas, M. Nasser bahwa kasus ini tidak bisa serta merta dilimpahkan tanggung jawabnya kepada kepolisian saja, namun juga melibatkan pemda yang tidak mengurus penambangan illegal.

“... motor dari masalah kan Kepala Desa, Kepala Desa kan aparatnya Bupati harusnya Bupati bertanggung jawab.”

Namun dia juga menyalahkan anggotanya yaitu keterlambatan perihal laporan tanggal 10 September dan kegagalan menjaga keamanan warga. Kemudian Psikiater, Hubertus Kasan Hidayat mengatakan bahwa tersangka mempunyai psikopat yang tinggi dan kata kunci dari kasus ini adalah pembiaran.



Gambar 10

Psikiater menjelaskan argumentasinya saat mengamati kasus pembantaian Salim Kancil, pada segmen tujuh

Pada akhir segmen pembawa acara, Karni Ilyas menyimpulkan bahwa problem disetiap daerah munculnya menifestasi criminal, pembunuhan Salim Kancil adalah rangkaian kejahatan berjamaah yang sistematis melibatkan berbagai pihak di Lumajang dan penanganan hanya berhenti di pioneer bukan ke system yang ada. Kemudian dia mengutip kata Jurnalis Boston Amerika.

“saya memulai karir reporter politik 25 tahun yang lalu, tapi politik itu sekarang berevolusi menjadi kejahatan berorganisir.”

Dalam babak ketiga ini penulis mengidentifikasi adanya beberapa konsep ruang publik menurut Jurgen Habermas dari pernyataan tiap bintang tamu.

Tabel 5.3

Babak Ketiga : Pengamat Kasus Penambang Ilegal Lumajang

Nama	Ciri Ruang Publik				
	Bebas	Terbuka	Opini Publik	Setara	Independen
As'at Malik (Bupati Lumajang)	Mengutuk perilaku yang tidak sepatutnya, sama saja karena semua rakyatnya. Masyarakat menunggu action dan sudah banyak yang berjalan sesuai tugasnya. Dia merasa sudah melakukan banyak penertiban sebelum kejadian dan jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan itu karena musibah dan tidak hanya ada di Lumajang.	Bupati menjabarkan beberapa tindakan yang sudah dia lakukan terkait penambangan mulai tahun 2008 hingga tahun 2015. Di tahun 2015 sudah melakukan enam kali penertiban terkait penambangan dan tower.			
Syaeffullah Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Timur) <i>video call</i>	Wagub mengatakan Bupati Walikota yang memiliki instrument untuk mengawasi penambangan baik legal maupun illegal dan harus bersinergi dengan Polri setempat.	Menceritakan tentang tata cara penambangan secara legal.			

<p>Oni Mahrdira, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur</p>		<p>Menjabarkan tentang beberapa perusahaan yang menambang pasir besi di seluruh Jawa Timur dan untuk kasus Salim Kancil lokasi penambangan masuk lahan Perhutani. Menurut Perencanaan Tata Ruang, Lumajang adalah wilayah rawan bencana namun juga menjadi kawasan tambang.</p>			
<p>Akbar Faisal (Anggota DPR Komisi 3, Hukum dari fraksi Nasdem)</p>	<p>Dengan nada tinggi dia mengatakan, <i>“ kalau anda tidak tahu, berarti anda tidak cakap memimpin daerah anda! Anda tidak cerdas mengelola daerah anda. Mohon maaf Bupati kalau mau mengelola Negara anda harus begini bahasanya.”</i> Akbar Faisal menyebutkan nama wakil direktur bernama Deni dan langsung mengatakan bahwa ketua DPRD Lumajang mengenalnya. Dia juga mengatakan kekesalannya saat meminta Kapolres lama untuk diperiksa namun di hadang oleh Ketua DPRD Lumajang.</p>	<p>Adanya pembiaran oleh pemda, apapun alasan dari Bupati. Anggota DPR mengapresiasi Polda Jatim yang dengan cepat mengambil alih kasus dari daerah.</p>			

<p>Irjen Pol Anton Charliyan (Kadiv Humas Polri)</p>	<p>Polisi sudah membentuk beberapa tim untuk mengusut kejadian bukan hanya cari panggung seperti yang dikatakan Kontras tadi. Bukan hanya anggota polisi saja yang menjadi penikmat tertinggi, ada perhutani yang menerima puluhan juta dari kasus ini. Kasus ini tidak bisa serta merta dilimpahkan tanggung jawabnya kepada kepolisian saja, namun juga melibatkan pemda yang tidak mengurus penambangan illegal.</p>	<p>Mengatakan sudah menangkap dua perwira dan satu bintangara.</p>			
<p>M. Nasser (Komisioner Kompolnas)</p>	<p>Kasus ini tidak bisa dilimpahkan tanggung jawabnya kepada kepolisian saja, pemda juga patut disalahkan karena pembiaran penambangan illegal.</p>	<p>M. Nasser juga menyalahkan anggota kepolisian yang gagal menjaga keamanan warga.</p>			
<p>Hubertus Kasan Hidayat (Psikiater)</p>			<p>Mengatakan bahwa tersangka mempunyai psikopat yang tinggi dan kata kunci dari kasus ini adalah pembiaran.</p>		

5.2. Refleksi Hasil Penelitian

Jurgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan benang merah dalam sejarah peradaban Barat, politikus dan filsafat yang duduk berdiskusi di *café, literary salon, atau pubs* yang menjamur di Inggris, Jerman dan Prancis pada abad ke-18. Bukan representasi status aristokrasi ataupun tindakan elit politis, melainkan partisipasi warga dalam memperbincangkan persoalan-persoalan publik. Pemikiran Habermas mengenai ruang publik dalam karyanya yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1989) terdapat dua pokok tema, pertama, analisis mengenai asal mula ruang publik borjuis. Bahasan yang kedua mengenai perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya organisasi-organisasi yang bergerak dalam ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik.

Dengan dasar itulah peneliti akan mendeskripsikan program acara *talkshow* televisi Indonesia Lawyers Club (TV One), episode “Mengungkap Mafia Pembantai Salim Kancil” yang tayang *live* hari selasa, 6 Oktober 2015 yang berpotensi menjadi ruang publik di zaman modern menurut teori ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Dalam bab ini penulis akan lebih mendeskripsikan ruang publik menurut Jurgen Habermas yang dikaitkan dengan program acara ini. Konsep yang dimiliki ruang publik sebagai berikut :

- a. Ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Adanya jaminan bagi mereka untuk berkumpul dan mengekspresikan ide dan gagasan serta pendapat secara bebas tanpa ada perasaan takut atau tekanan dari pihak manapun.

Episode ini ditayangkan secara *live* atau langsung, sehingga jelas bahwa tidak akan ada sensor dalam acara ini. Wilayah sosial yang bebas juga ditunjukkan dari beberapa argumentasi dari bintang tamu yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, seperti menggunakan bahasa daerah, menyatakan keberatannya atas pernyataan dari bintang tamu lain, dan

bahkan menggunakan kata atau kalimat sarkasme seperti yang dilontarkan koordinator KontraS dan Anggota DPR untuk menjawab pernyataan Bupati Lumajang. Dan tidak ada dominasi dalam episode ini karena semua bintang tamu dapat mengatakan argumentasinya masing-masing.

- b. Informasi merupakan bagian paling penting dalam ruang publik. Dalam ruang publik orang dapat menjelaskan secara eksplisit menjelaskan posisinya melalui argument dan pandangan mereka di umumkan ke publik secara luas.

Sebanyak 23 bintang tamu dengan berbagai profesi dihadirkan dalam Episode “Mengungkap Mafia Pembantai Salim Kancil”. Dan masing-masing bintang tamu dapat menjelaskan informasinya secara eksplisits sesuai dengan posisinya, seperti saksi yang menceritakan dengan detail, kepolisian yang menjabarkan kasus, dan beberapa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah.

- c. Ruang publik merupakan ruang penciptaan opini non-pemerintah atau opini publik, sebuah ruang abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota – anggota masyarakat di luar kendali pemerintah.

Banyak bintang tamu yang mengungkapkan argumentasinya dalam Episode ini dan tidak semua berasal dari lembaga pemerintahan. Dalam episode ini masyarakat biasapun dapat menyampaikan opininya yang berkaitan dengan kasus pembantaian Salim Kancil dan Tosan. Bahkan beberapa kali masyarakat biasa ini menyalahkan pemerintah.

- d. Ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu dalam kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan Negara. Tidak ada perlakuan istimewa (*privilege*) terhadap peserta diskusi (partisipan). Tidak adanya *privelege* diartikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesetaraan dalam proses wicara. Tidak ada kelompok yang lebih dominan atas kelompok lainnya. Inilah yang kemudian akan dijelaskan dalam bagian berikutnya sebagai ekualitas.

Jelas terlihat bahwa program acara *talkshow* Indonesia Lawyers Club menyediakan sebuah ruang bagi kepentingan pribadi untuk menyuarakan aspirasinya kepada kehidupan sosial dan publik. Narasumber utama dari mulai keluarga Salim Kancil, hingga Bupati Lumajang hadir. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur yang tidak bisa dihadirkan dilokasi, tidak menjadi hambatan, dapat diatasi dengan cara dilakukan video call. Namun demikian tim mengakui adanya kekurangan yaitu belum bisa menemukan para sopir truk yang mengangkut pasir-pasir tersebut untuk mengetahui kemana dibawa dan untuk keperluan apa, pada saat itu pihak kepolisian pun masih terus mencari keberadaan mereka. Korban atau tokoh utama dari setiap tema perepisodenya selalu dihadirkan supaya adanya keseimbangan informasi yang disajikan dalam program acara ini. Dan semua bintang tamu mendapat kesempatan untuk memberikan argumentasinya secara terbuka dan bebas. Kemudian tidak ada treatment khusus kepada keluarga korban, kecuali tim reporter ILC mendatang langsung ke Lumajang dan melihat dari dekat kondisi wilayah tersebut.²³

- e. Ruang publik berfungsi sebagai tempat independent dari pemerintah dan otonom partisan kekuatan ekonomi tertentu, didedikasikan pada debat rasional (tidak diarahkan demi kepentingan tertentu) terbuka bagi siapa saja serta terbuka untuk inspeksi masyarakat. Dalam ranah inilah opini public terbentuk.

Beberapa bintang tamu yang mengatakan argumentasinya menurut pengalaman diri sendiri maupun pendapat diri sendiri dengan menggunakan kata “saya” dalam kalimatnya. Namun program acara *talkshow* Indonesia Lawyers Club adalah produk dari sebuah televisi yaitu TV One. Tentu saja TV One tidak bisa berjalan jika tidak ada faktor lain yang mendukung salah satunya iklan. Semakin menarik program acara ini akan semakin banyak penonton sehingga akan menarik banyak iklan yang masuk dalam program acara ini. Tidak bisa dipungkiri dalam episode ini

²³Hasil wawancara dengan eksekutif produser program acara ILC, melalui email pada Kamis, 25 Agustus 2016.

terjadi debat rasional, namun hal ini terjadi karena pembawa acara yang aktif dan dapat menemukan celah untuk menanyakan hal yang akan mengundang emosi bintang tamu lain. Seperti contohnya sejak awal acara dimunculkan pertanyaan,

*“Benarkah pemkab atau pemprov Lumajang tidak tahu?
Benarkah PT IMMS yang menjadi tersangka tidak ada di
belakang kepala desa?”*

Dan pembawa acara secara terus menerus menanyakan hal tersebut kepada beberapa bintang tamu. Kemudian saat Ketua DPRD Lumajang dan Bupati mengatakan pernyataannya selalu saja di tanyakan mengapa tidak ada tindakan untuk mencegah terjadinya pembantaian Salim Kancil ini. Sehingga terlihat bahwa pembawa acara ingin membentuk opini public bahwa pejabat tertinggi ikut serta dalam pembiaran kasus Salim Kancil.

Habermas menghitung “kekerasan struktural” dan kemungkinan “komunikasi yang terdistorsi secara sistematis” sebagai sesuatu yang beroperasi di dalam ruang publik (Budi, 2010:190). Habermas mengartikan bahwa ruang publik tidak terbentuk secara spontan seperti yang dikatakan Hannah Arendt, seolah-olah warga aklamasi dianugerahkan begitu saja dari hati yang tulus, melainkan sebuah pertimbangan rasional tanpa rasa takut dinyatakan secara publik oleh para aktor kepentingan untuk menguji klaim kesahihan alasan-alasan yang dilontarkan. Begitu juga dengan program acara *talkshow* Indonesia Lawyers Club, program ini dibentuk untuk menampilkan dialog mengenai masalah hukum dan beberapa topik lainnya yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat setiap minggunya. Acara ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dalam topik yang diangkat.

Meskipun demikian Habermas mengatakan adanya “refeodalisasi” yaitu negara dan pasar melakukan intervensi hegemonis ke dalam ruang publik sehingga ruang publik yang di dalam era pencerahan Borjuis abad ke-18 berciri otonom dan kritis terhadap ekonomi dan birokrasi itu kini malah menjadi arena kepentingan pasar dan birokrasi pada abad ke-20 (Budi, 2010:195). Kemudian di lain pihak birokrasi itu sendiri mulai campur tangan ke dalam wilayah privat dan

keseharian warganegara, sehingga mengaburkan distingsi antara privat dan publik yang dalam era borjuasi cukup jelas dipertahankan. Perubahan konstelasi itulah yang disebutnya *Strukturwandel der öffentlichkeit* (perubahan struktur ruang publik). Ruang publik diubah yang mulanya lingkup perdebatan menjadi lingkup manipulasi dan konsumsi oleh investor raksasa. Dalam program acara *talkshow* Indonesia Lawyers club memang menunjukkan beberapa konsep ruang publik yaitu bebas, terbuka, opini publik namun tidak bisa dipungkuri bahwa pembawa acara mempunyai andil yang penting dalam setiap pernyataan dan jawaban dari bintang tamu yang hadir. Dalam episode “Mengungkap Mafia Pembantai Salim Kancil” terlihat jelas bahwa pembawa acara sejak awal mengarahkan opini publik untuk menghakimi pemerintah tingkat Kabupaten Lumajang. Dan hal ini juga terlihat dari nama tema yang memilih kata “Mafia” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti perkumpulan rahasia yg bergerak di bidang kejahatan (kriminal)²⁴.

Sebelum menjadi program acara *talkshow* di TV One, Indonesia Lawyers club yang awalnya bernama Jakarta Lawyers Club hanya sebuah perkumpulan *lawyers* yang berdiskusi tentang perkembangan para advokat itu sendiri yang mengandung kontroversi, dikupas secara mendalam, didukung dokumentasi bersejarah yang dilengkapi dengan kekuatan para sumber yang diantaranya yang mengalami pada saat kejadian sejarah, saksi sejarah yang melihat pada saat kejadian sejarah, sampai pengamat sejarah yang mempelajari setiap kejadian sejarah. Namun setelah itu diangkat untuk menjadi konsumsi public di stasiun televise SCTV kemudian pindah ke TV One. Sesuai dengan pernyataan Habermas bahwa pada wilayah social, media tidak lagi menjadi fasilitas diskursus rasional, melainkan menjalankan konstruksi, seleksi dan formasi diskursus itu menjadi komoditas hiburan yang dapat dikonsumsi secara pasif oleh para pemirsa. Ruang public sendiri kini telah berubah fungsinya menjadi kumpulan iklan-iklan, dan mengubah peran “warganegara” menjadi “konsumen”. Hasil akhir dari ruang publik Jurgen Habermas adalah mengatasi kepentingan dan opini privat guna menemukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus sosial. Sayangnya

²⁴ <http://kbbi.co.id/arti-kata/mafia> diakses Sabtu, 13 Agustus 2016 pukul 19.20 WIB

acara ini tidak dapat memunculkan keputusan akhir atau konsensus sosial, karena tujuan dari acara ini hanya ingin mengungkap sebuah tema yang mendapat sorotan publik secara lebih mendalam, dan tujuan utama acara ini pada dasarnya sama dengan tujuan nasional secara umum, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara utuh dan mendalam.²⁵ Dan tayangan ini tidak mempengaruhi persidangan kasus pembantaian Salim Kancil, karena pada akhirnya tetap kepala desalah yang dihukum paling tinggi. Mantan Kepala Desa Selok Awar-awar di kota Lumajang, Jatim, Hariyono dan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, Mat Dasir dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan secara berencana. Pada sidang Kamis, 23 Juni 2016 pelaku utama pembunuhan petani dan aktivis anti tambang Salim Kancil telah divonis bersalah dan diganjar hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan eksekutif produser program acara ILC, melalui email pada kamis, 25 Agustus 2016.

²⁶http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_salimkancil_vonis diakses, 18 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB